



BSKDN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

OUTLOOK

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



BSKDN Kemendagri



@bskdn.kemendagri



@BSKDNkemendagri



TUGAS BSKDN

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan **perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan** di bidang pemerintahan dalam negeri.

FUNGSI BSKDN

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
3. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. Fasilitasi, pembinaan dan asistensi pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pemerintah daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
6. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

SOTK BSKDN | berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022



ARAH & KEBIJAKAN BSKDN

1. **Merumuskan dan menyusun rekomendasi** strategi kebijakan berdasarkan isu-isu strategis serta data dan fakta lapangan (*evidence based policy*), melalui:
 - a. **Meningkatkan pendayagunaan hasil evaluasi, data dan fakta** yang didasarkan pada regulasi yang ada untuk menemukenali isu-isu strategis sebagai bahan strategi kebijakan dalam perumusan kebijakan pemdagri.
 - b. **Meningkatkan Keterlibatan Badan Strategi Kebijakan Dalam perumusan kebijakan dalam negeri**; dan
 - c. **Meningkatkan kualitas hasil rekomendasi** strategi kebijakan.
2. **Melakukan analisa secara komprehensif** terhadap isu-isu strategis pemdagri.
3. **Meningkatkan pendayagunaan rekomendasi strategi kebijakan** dalam rangka perumusan kebijakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. **Monitoring dan evaluasi strategi kebijakan pusat dan daerah** melalui fasilitasi, asistensi, penguatan inovasi, digitalisasi, dan penilaian kelembagaan, melalui:
 - a. **Pembentukan kelembagaan, penerapan digitalisasi, dan penerapan, penilaian, serta pembinaan inovasi** dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik;
 - b. **Penerapan Program Langit Biru (Prolabir)** untuk kontribusi terhadap pengurangan pencemaran udara;
 - c. **Penguatan proyeksi Green APBD (penguatan lingkungan hidup)**; dan
 - d. **Penerapan smart city dan smart village.**
5. **Penguatan penyelenggaraan strategi kebijakan**, melalui:
 - a. **Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM** di Badan Kebijakan Strategi pusat dan daerah;
 - b. **Penguatan organisasi strategi kebijakan pusat dan daerah**; dan
 - c. **Penguatan tatalaksana penyelenggaraan strategi kebijakan pusat dan daerah.**

KOLABORASI **BSKDN**



Kolaborasi riset dan analisis kebijakan



Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

**Tanoto
Foundation**

Identifikasi dan pembinaan inovasi pendidikan



Kolaborasi riset dan analisis kebijakan



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

Dukungan teknis pembaruan IPKD, ITKPD, dan Pembinaan Inovasi Daerah



Dukungan teknis pembaruan IPKD, ITKPD, dan Pembinaan Inovasi Daerah

KOMPAS TV

Kolaborasi pembuatan konten publikasi



Kolaborasi riset dan analisis kebijakan



Peningkatan kapasitas ASN untuk analisis kebijakan



Knowledge sharing terkait Hortikultura dan Agribisnis



Lembaga yg sdh memiliki Lol dan menyatakan minat kerjasama



PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN **POLITIK, HUKUM DAN** **PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

TUGAS

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, serta penetapan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan Desa.

JUDUL REKOMENDASI KEBIJAKAN

TAHUN 2023

Policy Brief Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Policy Brief Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Policy Brief Antisipasi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024

Policy Brief Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda

Policy Brief Strategi Pemerintah Daerah Dalam Efisiensi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024

Policy Brief Upaya Pencegahan Politisasi Lembaga Pendidikan pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Policy Brief Strategi Pencegahan Konflik Sosial Untuk Menyukseskan Pemilu 2024

JUDUL REKOMENDASI KEBIJAKAN

TAHUN 2024

Alternatif Kebijakan Penganggaran Pilkada Serentak

Strategi Pemuktahiran Data Pemilih pada Pilkada Serentak

Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Partai Politik Untuk Penguatan Demokrasi Indonesia

Strategi Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 Dari Perspektif HAM

Strategi menjaga stabilitas politik dan keamanan pada Pilkada Serentak 2024

Analisis Komparasi Kinerja Kepala Daerah Definitif (Elektoral) dengan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah

Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN **KEWILAYAHAN, KEPENDUDUKAN,** **DAN PELAYANAN PUBLIK**

TUGAS

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, serta penetapan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan, serta penetapan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang administrasi kewilayahan daerah dan Desa, kependudukan dan pencatatan sipil

JUDUL REKOMENDASI KEBIJAKAN

TAHUN 2023

Analisis Dinamika Persoalan Kinerja Pemerintahan Desa (Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Analisis Penerapan Family Book sebagai Dokumen Kependudukan

Analisis Penguatan Kolaborasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Banjir Rob

Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Peningkatana Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di daerah

Policy Brief dan draft Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

JUDUL REKOMENDASI KEBIJAKAN

TAHUN 2024

Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah

Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pra Bencana Berbasis Partisipasi Publik

Analisis Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan publik

Model Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Daerah

Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Di Daerah

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, KEUANGAN DAERAH DAN DESA

TUGAS

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, serta penetapan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembangunan, keuangan daerah dan Desa

JUDUL REKOMENDASI KEBIJAKAN

TAHUN 2023

Analisis Penilaian Kriteria dan Pembobotan Variabel Kota Bersih

Analisis Penerapan Family Book sebagai Dokumen Kependudukan

Analisis Penguatan Kolaborasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Banjir Rob

Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di daerah

JUDUL REKOMENDASI KEBIJAKAN

TAHUN 2024

Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Terhadap Laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia

Strategi Penguatan Sistem Anti Korupsi di Desa

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM, TEKNOLOGI INFORMASI DAN INOVASI Pemdagri

TUGAS

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan anggaran, moneyv, serta penetapan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan SDM, penerapan TI dan Inovasi Pemdagri serta Pengelolaan Pelaporan Inovasi Daerah

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PENILAIAN INOVASI TERPADU LINTAS K/L BERBASIS INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2024

SASARAN/INDIKATOR	TARGET 2024 (PEMDA)	CAPAIAN 2024	PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN TARGET (%)	KETERANGAN
Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi Wilayah Sumatera (Persen)	56	89.02	158.12%	146 DARI 164 PEMDA TELAH MENCAPAI NILAI INDEKS INOVASI TINGGI
Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi Wilayah Jawa Bali (Persen)	77	98.45	127.19%	127 DARI 129 PEMDA TELAH MENCAPAI NILAI INDEKS INOVASI TINGGI
Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi Wilayah Kalimantan (Persen)	43	77.78	181.72%	49 DARI 61 PEMDA TELAH MENCAPAI NILAI INDEKS INOVASI TINGGI
Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi Wilayah Sulawesi (Persen)	44	65.52	150.61%	57 DARI 87 PEMDA TELAH MENCAPAI NILAI INDEKS INOVASI TINGGI
Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi Wilayah Nusa Tenggara (Persen)	43	66.67	156.86%	20 DARI 34 PEMDA TELAH MENCAPAI NILAI INDEKS INOVASI TINGGI
Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi Wilayah Maluku (Persen)	36	60.87	169.08%	6 DARI 12 PEMDA TELAH MENCAPAI NILAI INDEKS INOVASI TINGGI
Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi Wilayah Papua (Persen)	36	15.91	44.19%	7 DARI 44 PEMDA TELAH MENCAPAI NILAI INDEKS INOVASI TINGGI

INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) adalah instrumen yang terdiri atas seperangkat variabel, dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah

TUJUAN

1. Mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Menetapkan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah.
5. Memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

PROGRESS INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH



PENGUKURAN IKKD

IKKD



INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH



ITKPD merupakan indeks yang secara komprehensif mengukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan keterkaitan antara sistem pendukung, kapasitas pemerintahan dan capaian pembangunan daerah.

ASPEK SISTEM PENDUKUNG

Merupakan ukuran kondisi berbagai sistem yang menjadi faktor pendukung pemerintahan dalam melaksanakan tata kelola meliputi Demokrasi, Dinamika Sosial dan Potensi Daerah.

ASPEK KAPASITAS PEMERINTAHAN

Merupakan ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola kelembagaan, keuangan daerah, serta pemenuhan layanan publik.

ASPEK CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Merupakan ukuran yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

KELUARAN DAN ARAH PEMANFAATAN

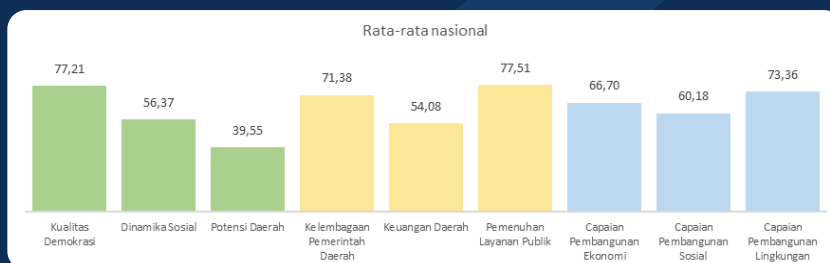
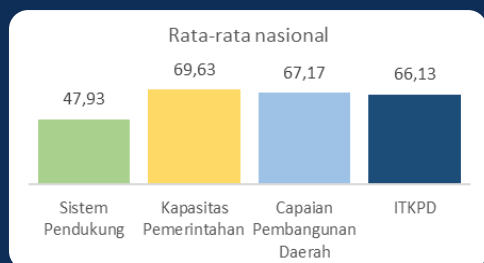
Secara umum ITKPD dapat menghasilkan:

1. Analisis kondisi tata kelola pemerintahan daerah secara umum maupun kondisi dari sistem pendukung, kapasitas pemerintahan, dan capaian pembangunan daerah dari suatu daerah.
2. Analisis tematik dalam rangka perumusan kebijakan strategis tingkat nasional.
3. Peta pembinaan dan rekomendasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Keluaran ITKPD dapat dimanfaatkan Pempus & Pemda untuk:

1. Menggambarkan kondisi tata kelola pemda secara komprehensif dan lintas sektor.
2. Salah satu alternatif untuk bahan evaluasi, pedoman intervensi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

GAMBARAN UMUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

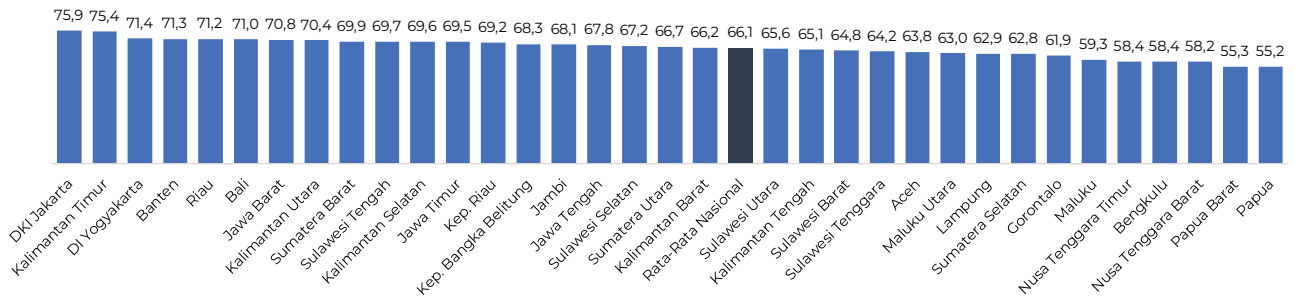


Secara rata-rata nasional, kondisi tata kelola pemerintah daerah berada pada kategori cukup. Adapun jika dilihat per aspek, kualitas sistem pendukung pemerintahan daerah pada umumnya berada di katagori kurang dengan rata-rata skor 47,93; kapasitas pemerintahan pada kategori cukup dengan rata-rata skor 69,63; dan capaian pembangunan daerah pada kategori cukup dengan rata-rata 67,17.

Pemerintahan daerah perlu adanya upaya-upaya untuk mendorong kualitas sistem pendukungnya baik dari sisi kualitas demokrasi, kondisi keamanan dan kohesivitas sosial, maupun mendorong pemanfaatan atas potensi-potensi daerah yang ada.

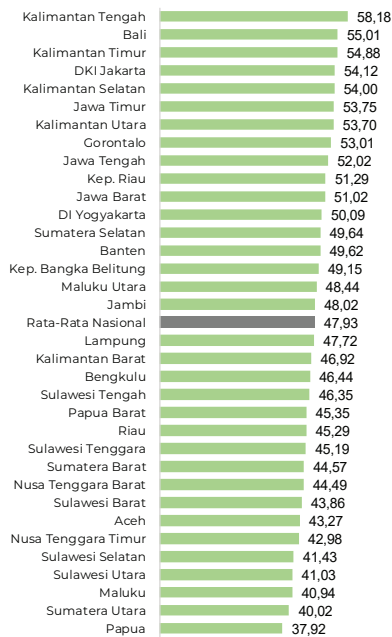
HASIL PENILAIAN ITKPD PROVINSI

ITKPD

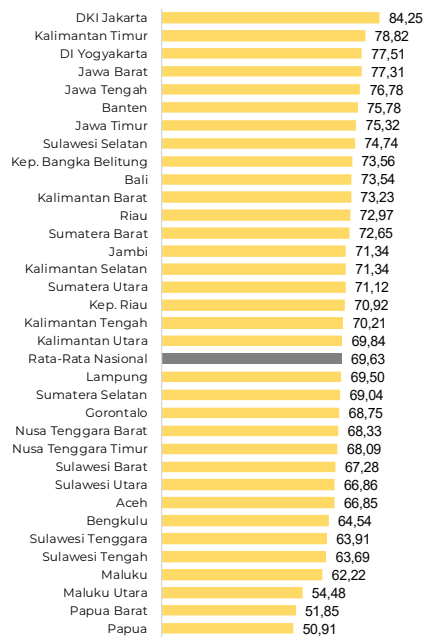


Berdasarkan gambar diatas, Kualitas tata kelola pemerintahan daerah pada 34 Provinsi di Indonesia pada umumnya berada pada kategori cukup. Terdapat 8 Provinsi yang memiliki nilai ITKPD berkategori Baik yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Banten, Riau, Bali, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara. Adapun 26 provinsi lainnya berada pada kategori cukup. Tidak ada provinsi yang memiliki kategori Sangat Baik, Kurang maupun Sangat Kurang.

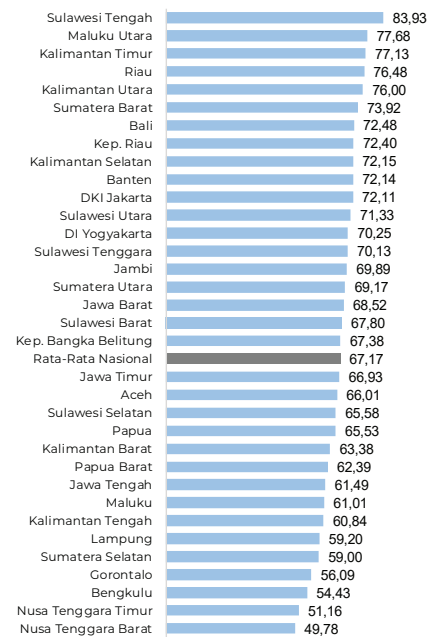
SISTEM PENDUKUNG



KAPASITAS PEMERINTAHAN



CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH



1. Jika dilihat per aspek, pada Aspek Sistem Pendukung, rata-rata nasional berada pada kategori kurang. Hanya terdapat 2 Provinsi yang memiliki sistem pendukung yang cukup yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali. Adapun provinsi dengan kualitas sistem pendukung sangat kurang yaitu provinsi Papua. Tidak ada provinsi yang memiliki nilai kualitas sistem pendukung yang baik maupun sangat baik.
2. Pada Aspek Kapasitas Pemerintahan, rata-rata nasional berada pada kategorinya cukup. 18 provinsi sudah masuk dalam kategori memiliki kapasitas pemerintahan yang baik, 13 provinsi memiliki kapasitas pemerintahan yang cukup, dan terdapat 3 provinsi yang memiliki kapasitas pemerintahan kurang, yaitu Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
3. Pada Aspek Capaian Pembangunan Daerah, rata-rata nasional berada pada kategori cukup. 14 provinsi sudah masuk dalam kategori memiliki capaian pembangunan daerah yang baik, 17 provinsi memiliki capaian pembangunan yang cukup baik, dan terdapat 3 provinsi yang memiliki capaian pembangunan kurang baik, yaitu Provinsi Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

	KLASTER	KLASTER	KLASTER
	KAPASITAS FISKAL TINGGI	KAPASITAS FISKAL SEDANG	KAPASITAS FISKAL RENDAH
PROVINSI	JAWA BARAT 80,879	KALIMANTAN BARAT 80,879	YOGYAKARTA 87,327
KABUPATEN	PASER 82,649	TOJO UNA UNA 84,252	SOPPENG 84,436
KOTA	SEMARANG 81,881	BANJARMASIN 82,063	PEKALONGAN 80,859

PEMANFAATAN IPKD DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN

DITJEN BINA KEUDA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEND. BINA KEUDA SEKALIGUS MERUPAKAN PETA PEMBINAAN UMUM DITJEN KEUDA TERKAIT TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

AKADEMISI

BERMANFAAT UNTUK KEPERLUAN RISET DAN ANALISIS KEBIJAKAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA RISET

BAPPENAS

INDIKATOR PENGUKURAN KOTA BERKELANJUTAN

PEMDA

SEBAGAI ACUAN UMUM PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH DAN DI BEBERAPA DAERAH MENJADIKAN SEBAGAI IKU OPD TERKAIT TATA KELOLA KEUANGAN

KPK

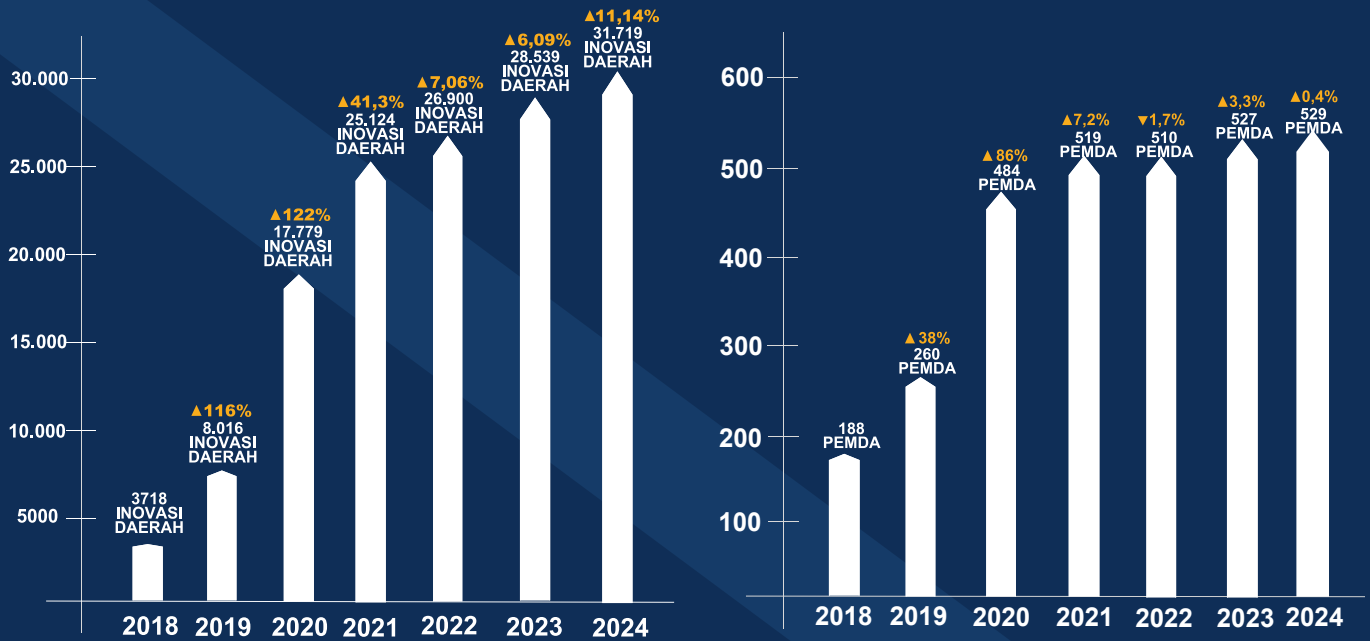
PENCEGAHAN KORUPSI PADA PEMDA KHUSUSNYA DI AREA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

INDEKS INOVASI DAERAH

Rekapitulasi penginputan data inovasi pasca penutupan sistem Indeks Inovasi Daerah 22 Agustus 2024 (23.59 wib)



JUMLAH PARTISIPAN



SEBARAN LAPORAN INOVASI BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024



PETA DISTRIBUSI INOVASI DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2024



PERKEMBANGAN RATA-RATA SKOR INDEKS INOVASI DAERAH PER WILAYAH (PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA) TAHUN 2024

Pemda	2023	2024	Pertumbuhan
Wilayah Aceh	41,15	45,05	9,47%
Wilayah Bali	53,31	62,27	16,81%
Wilayah Banten	51,58	45,66	-11,47%
Wilayah Bengkulu	46,68	47,52	1,80%
Wilayah DI Yogyakarta	57,67	58,21	0,92%
Wilayah DKI Jakarta	80,98	80,18	-0,99%
Wilayah Gorontalo	42,93	39,22	-8,64%
Wilayah Jambi	37,84	43,25	14,31%
Wilayah Jawa Barat	52,22	57,10	9,36%
Wilayah Jawa Tengah	57,80	62,93	8,88%
Wilayah Jawa Timur	56,75	65,30	15,06%
Wilayah Kalimantan Barat	40,11	44,77	11,62%
Wilayah Kalimantan Selatan	50,69	58,98	16,35%
Wilayah Kalimantan Tengah	34,62	39,19	13,22%
Wilayah Kalimantan Timur	36,17	42,54	17,61%
Wilayah Kalimantan Utara	42,48	46,47	9,39%
Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	53,36	55,49	3,99%
Wilayah Kepulauan Riau	47,14	46,23	-1,92%
Wilayah Lampung	55,99	61,83	10,41%

Pemda	2023	2024	Pertumbuhan
Wilayah Maluku	26,65	31,88	19,65%
Wilayah Maluku Utara	37,26	44,23	18,73%
Wilayah Nusa Tenggara Barat	52,12	54,67	4,90%
Wilayah Nusa Tenggara Timur	34,54	32,81	-4,99%
Wilayah Papua	11,00	18,71	70,05%
Wilayah Papua Barat	15,28	18,28	19,62%
Wilayah Papua Barat Daya	7,19	13,05	81,54%
Wilayah Papua Pegunungan	1,56	1,16	-25,71%
Wilayah Papua Selatan	11,47	11,87	3,54%
Wilayah Papua Tengah	8,83	5,90	-33,20%
Wilayah Riau	48,88	51,65	5,65%
Wilayah Sulawesi Barat	33,44	37,51	12,17%
Wilayah Sulawesi Selatan	42,97	45,66	6,25%
Wilayah Sulawesi Tengah	36,26	41,15	13,48%
Wilayah Sulawesi Tenggara	30,54	33,57	9,91%
Wilayah Sulawesi Utara	32,87	34,97	6,41%
Wilayah Sumatera Barat	54,15	59,80	10,42%
Wilayah Sumatera Selatan	47,94	53,02	10,58%
Wilayah Sumatera Utara	38,09	42,00	10,26%

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

PROSES MEMBUDAYAKAN INOVASI DALAM ORGANISASI PEMDA



STRATEGI PELEMBAGAAN INOVASI DAERAH PENGALAMAN DAERAH LAIN

LEADERSHIP

Wali Kota Surabaya memiliki komitmen kuat dalam mengawal keberlanjutan Inovasi dengan mengharuskan kepala OPD di lingkup Pemkot Surabaya. Terdapat konsekuensi bagi kepala OPD yang tidak mampu menjalankan amanah, menjadi orang yang solutif, dan enggan berinovasi

IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH

Patriot Desa yang dibentuk oleh DPMD Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah desa untuk memahami dan menggali potensi-potensi yang ada di desa. Patriot Desa dibentuk langsung oleh Gubernur Jawa Barat sebagai pendamping untuk memajukan desa-desa di Jawa Barat.

SDM INOVASI (TIM)

Pembentukan Klinik Inovasi Daerah (Klik id) Kota Mojokerto sebagai upaya penguatan inovator perangkat daerah. Penguatan secara digital melalui WA Blast, X-space dan aplikasi Sipelita. Penguatan scr nondigital melalui jemput bola atau ruang konsultasi di Bappedalitbang.

KOLABORASI

Tim Kerja Bappeda Kab. Wonogiri bekerjasama dengan program KKN dengan Universitas setempat dalam Pendampingan dan pengembangan inovasi daerah di OPD, desa, masyarakat serta melakukan sosialisasi program-program inovasi.

SINKRONISASI DAN INTEGRASI

Manajemen layanan yang terintegrasi dalam satu platform Jogja Smart Service oleh Kota Yogyakarta. Layanan dinas tidak berdiri secara terpisah melainkan tergabung dalam satu portal bersama.

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pelembagaan Rapor Kinerja PD Kab. Banyuwangi perwujudan dimana inovasi menjadi salah satu poin yang dilakukan asesmen. Insentif diberikan kepada 5 PD berkinerja tinggi dengan tambahan persentase TPP yang bervariasi. Disinsentif diberikan kepada 5 PD berkinerja rendah yaitu pengurangan TPP sebesar 15% yang disubstitusikan ke PD kinerja tinggi.

PEMANFAATAN PRODUK DIKLAT

Rencana aktualisasi CPNS dilingkungan Kabupaten Temanggung diarahkan untuk menciptakan inovasi berdasarkan tuis perangkat daerah sesuai penempatan CPNS tersebut.

REPOSITORY DATA

Beberapa pemda juga telah meningkatkan manajemen dan sinergitas data inovasinya melalui aplikasi Platform Satu Data Inovasi:

- Bi-Smart atau Boyolali Innovation System Management of Research and Technology di Kabupaten Boyolali
- Sistem Informasi Riset Inovasi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sragen (SI-RISMA) di Kabupaten Sragen -> 511 inovasi
- Gerbang Indah Wonogiri (GERAKAN GO NYAWIJI SEKARENGAN MBANGUN INOVASI DAERAH WONOGIRI) di Kabupaten Wonogiri -> data lokal terhimpun 1368 inovasi.